

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi sumber perkembangan ekonomi bagi suatu negara. Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan dan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pariwisata dipertimbangkan sebagai salah satu sektor yang mampu menjadi kontributor utama dalam sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹

Selain sektor pariwisata, ada juga sektor pertanian yang keberadaannya dalam pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan suatu negara tidak terkecuali Indonesia yang beriklim tropis dan dijuluki sebagai salah satu negara agraris, dimana sebagian besar daerah dan penduduknya melakukan aktifitas bercocok tanam. Salah satu sektor pariwisata di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan adalah agrowisata. Agrowisata merupakan penggabungan produk wisata yaitu aktivitas pertanian (agro) dan rekreasi di sebuah lingkungan pertanian. Dimana lingkungan tersebut memiliki peran lebih untuk menggabungkan aktifitas pertanian sehingga menjadi lebih menarik dan

¹ Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

menjadi tujuan wisata bagi khalayak ramai. Agrowisata merupakan sebuah bentuk pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata. Agrowisata merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.² Dimana wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.³

Terdapat beberapa jenis agrowisata yang dapat diidentifikasi berdasarkan potensi komoditas dan lingkungannya, antara lain agrowisata perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Masing- masing jenis agrowisata tersebut memiliki karakter yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula. Agrowisata pertanian contohnya merujuk pada penyediaan sarana wisata dan rekreasi bagi wisatawan mulai dari penanaman komoditas pertanian, saat-saat panen hingga penyajiannya untuk siap disantap.

Dalam prakteknya, pengembangan agrowisata tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di sekitar kawasan agrowisata. Masyarakat lokal berperan besar dalam keberhasilan sebuah agrowisata dimana keterlibatan masyarakat dan pemberdayaannya juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan rakyat yang selama ini dinilai relatif lemah, serta sekaligus akan membantu pemerintah dalam memerangi terjadinya *urban sprawl* yang selama ini

² Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Graha Ilmu: Yogyakarta hlm 129

³ Permenpar RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

belum ada cara ampuh untuk memeranginya. Oleh karena itu maka keterlibatan masyarakat dalam pengembangan agrowisata dapat diwujudkan dalam intensitas yang paling rendah hingga yang sangat menentukan maju mundurnya sebuah agrowisata, sekaligus membantu masyarakat lokal di sekitar kawasan agrowisata sehingga menjadi lebih berdaya yang berdampak kepada perekonomian, sosial dan budaya masyarakat sekitar.

Pengembangan agrowisata pada hakikatnya merupakan upaya terhadap pemanfaatan potensi atraksi wisata pertanian, dimana dalam pengembangannya melibatkan berbagai instansi dan jajaran kepentingan lainnya demi terwujudnya kawasan agrowisata yang mumpuni. Berdasarkan karakteristiknya yang mendasar ke seluruh operasi pada pertanian dan lahannya, maka pengembangan agrowisata selalu menuntut pengembangan seluruh sub-sistem pertanian secara terintegrasi. Seluruh sub-sistem agrowisata terikat dalam kesatuan kawasan, sehingga untuk mengembangkan agrowisata maka pengembangan kawasan mutlak diperlukan.

Pada sisi penawarannya, provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang besar dibidang pertanian dilihat dari keberadaan daya tarik wisata, dimana daya tarik wisata ini dapat dibedakan menjadi daya tarik wisata alamiah, budaya, lingkungan dan daya tarik event. Budaya masyarakat Minangkabau yang masih kental akan bercocok tanam tentunya menjadi salah satu point bagi pengembangan sektor pariwisata dari sub sektor agrowisata. Di samping itu, Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan kawasan pengembangan komoditas tersebut dengan dasar kesesuaian wilayah dan preferensi masyarakat. Keputusan ini juga sekaligus untuk mendukung dan mempersiapkan diri agar siap bersaing

dengan negara-negara lain dalam memasarkan produk unggulan menyambut akan diberlakukannya masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2015.⁴

Kota Padang menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang ikut serta dalam mengembangkan kawasan agrowisata, hal ini berawal pada bulan Oktober 2013, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat menjadi tempat pelaksanaan Hari Pangan Nasional yang saat itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh sejumlah menteri terkait. Masyarakat Sumatera Barat begitu antusias dengan acara tersebut mengunjungi anjungan-anjungan yang dibuat oleh sejumlah Dinas dan elemen masyarakat. Oleh karena antusiasme yang begitu baik sehingga terciptalah keinginan bahwa Pemerintah Sumatera Barat yang tidak ingin melewatkan momentum dari acara nasional tersebut yang kemudian melakukan diskusi bersama. Hasil diskusi mensyaratkan agar provinsi Sumatera Barat segera memiliki satu kawasan agrowisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat.⁵

Pada pertemuan awal, yang dilaksanakan pada acara Hari Pangan Nasional bulan November tahun 2013. Adapun pada awal perencanaannya yang menghadiri rapat di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun hanya ada lima Kepala Dinas pada tahun 2013, adapun yang menghadiri pertemuan awal tersebut pada tahun 2013 yaitu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala

⁴ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. 2014. Pengembangan kawasan jeruk, manggis, pisang, sayuran dan tanaman hias di Sumatera Barat.

⁵ Pemprov Sumbar Dinas Pertanian Tanaman Pangan UPTD BBI TPPH. 2016. Laporan Dukungan Pengembangan Agrowisata BBI Lubuk Minturun

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, yang mana dalam diskusi tersebut membahas perencanaan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat. Melalui diskusi bersama itulah dipilih Lubuk Minturun sebagai kawasan yang akan dijadikan suatu kawasan modern sebagai lokasi agrowisata dengan membangun berbagai macam infrastruktur yang menjadi penunjang bagi terwujudnya kawasan agrowisata, disamping karena sudah tersedianya lahan dan keelokan budaya lokalnya pemerintah bersama-sama SKPD terkait juga akan melengkapi sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan suatu kawasan agrowisata.

Lahan yang berlokasi di Lubuk Minturun ini dikelola oleh UPTD BBI TPPH Sumatera Barat dan memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai, terpilihnya Lubuk Minturun sebagai kawasan tepat guna wisata agro karena hal ini mengacu pada ketetapan kawasan Lubuk Minturun menjadi Kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013. Beberapa infrastruktur yang telah tersedia dan melakukan revitalisasi infrastruktur tersebut merupakan modal awal bagi Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kawasan ini.

Seperti yang dikemukakan juga oleh Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, menyebutkan bahwa :

“... pada awalnya konsep agrowisata ini datang ketika ada pelaksanaan Hari Pangan Nasional yang dibuka di kantor TVRI. Singkatnya, kegiatan ini disambut antusiasme masyarakat yang datang sehingga muncullah ide untuk memanfaatkan situasi ini untuk membuat suatu kawasan berbasis agrowisata yang tempatnya di Lubuk Minturun. Lalu dilakukanlah diskusi antar kepala Dinas OPD terkait, hasil diskusi diserahkan kepada Gubernur dan Gubernur selaku

pejabat yang paling tinggi memerintahkan Bappeda untuk memberikan opsi dana terkait pelaksanaan pembangunan kawasan agrowisata ini...” (Wawancara survey awal data dengan Kasi pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang pada Kamis 18 Januari 2018 Pukul 14.10 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep awal terbentuknya kawasan agrowisata ini muncul ketika besarnya antusiasme masyarakat terhadap konsep pameran yang sebagian besar diisi dengan tanaman hias, sayuran, buah-buahan yang dijadikan sedemikian rupa sehingga menjadi pameran dengan keindahan tersendiri untuk dilihat masyarakat.

Berikut pernyataan yang juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengenai kawasan Agrowisata melalui media online Antara Sumbar⁶ :

“...Kawasan agrowisata itu merupakan tempat pembibitan tanaman hortikultura sekaligus menjadi tempat wisata khususnya di Kota padang. Kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun memiliki luas lebih kurang 9,8 hektare dan memiliki berbagai macam tanaman...” (media online Antara Sumbar, Sabtu, 17 Desember 2016 14:06 WIB)

Kawasan agrowisata Lubuk Minturun nantinya akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur yang dapat menunjang sektor pertanian dan pariwisata yang berguna bagi khalayak ramai seperti yang tergambar pada Gambar 1.1 :

⁶ Sumbar kembangkan Balai Benih Induk Padang Pusat Agrowisata, Antara Sumbar Sabtu 17 Desember 2016 diakses Jumat tanggal 2 Maret 2018

Gambar 1.1
Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata



Sumber : Dokumentasi Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2014

Pada Gambar 1.1 banyaknya infrastruktur demi terwujudnya kawasan agrowisata yang direncanakan pada tahun 2014. Seperti yang diutarakan juga oleh Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, bahwa :

“... ada banyak hal yang dilakukan di kawasan ini, mencakup budidaya tanaman hias, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan banyak lagi sehingga kawasan ini dapat dijadikan kawasan edukasi dan sarana bermain bagi yang mengunjunginya ...” (Wawancara dengan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk Lubuk Minturun Kota Padang Hari Senin tanggal 20 November 2017 pukul 10.32- 11.40 WIB)

Berdasarkan Gambar dan pernyataan wawancara diatas, infrastruktur dalam pembangunan agrowisata yang dipusatkan di Lubuk Minturun tersebut memerlukan bantuan baik itu perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, dana dan tanggung jawab demi terwujudnya pembangunan infrastruktur tersebut. Disamping hal-hal ini, demi mewujudkan pembangunan yang berorientasi kepada

infrastruktur kawasan agrowisata maka perlu adanya koordinasi dari OPD yang membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimana instansi terkait memiliki tiap satuan tugas yang bertanggung jawab maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015, menetapkan hal-hal sebagai berikut :⁷

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk (BBI) Lubuk Minturun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
2. Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut : menyiapkan dan menyelesaikan kebutuhan kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun sebagai destinasi wisata agro, baik infrastruktur maupun substansi agrowisata, menyusun langkah-langkah persiapan *soft launching* kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun pada bulan Maret 2015 dan *Grand Opening* pada bulan Januari 2016, menyusun langkah-langkah promosi dan upaya mendatangkan kunjungan ke kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun baik setelah *soft launching* maupun *grand opening*, menyiapkan konsep pengelolaan kawasan agrowisata BBI Lubuk minturun baik setelah *soft launching* maupun *grand opening*.
3. Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata BBI Lubuk Minturun, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

⁷ Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015.

4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Adapun posisi Satgas dalam membangun kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat yang dipercayakan harus saling membantu dan diperlukan keterlibatan antar Satgas tersebut untuk berkoordinasi. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyingkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁸ Dimana dengan adanya koordinasi diharapkan setiap satuan tugas yang terlibat menjalin kerjasama dan komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi dalam hubungan timbal balik terjadi secara baik.

Keterlibatan Satuan Tugas (Satgas) dalam mewujudkan kawasan agrowisata yang tidak hanya satu instansi saja yang memiliki kewenangan keahlian dalam membangun kawasan. Dalam hal ini, secara teknis peran aktor dalam Satgas tersebut dibutuhkan koordinasi antar instansi yang benar-benar memahami dan melakukan sesuai tupoksinya, yaitu Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Prasjaltarkim, Dinas PSDA, dan Dinas Parekraf serta Dinas Hubkominfo. Seperti yang dikemukakan Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno melalui media online tentang agrowisata sebagai berikut⁹ :

⁸ Husaini, Usman.2011. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara hlm. 439

⁹ Sumbar kembangkan Balai Benih Induk Padang Pusat Agrowisata, Antara Sumbar Sabtu 17 Desember 2016 diakses Jumat tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.25 wib

“...Terbentuknya kawasan yang berfungsi sebagai taman kota, interaksi sosial, edukasi dan fungsi ekonomi yang dikelola secara terintegrasi oleh pemerintah dan swasta membuat kawasan BBI Lubuk Minturun cocok dijadikan sebagai tempat agrowisata. Beberapa tahun sebelumnya telah disepakati dan difasilitasi melalui anggaran SKPD terkait dalam mendukung kawasan BBI Lubuk Minturun sebagai pusat wisata pertanian. diharapkan kawasan agrowisata ini akan berkembang dari waktu ke waktu dengan dukungan berbagai pihak secara berkesinambungan...” (media online Antara Sumbar, Sabtu, 17 Desember 2016 14:06 WIB)

Jika tidak terjadi koordinasi diantara instansi-instansi tersebut maka akan mengakibatkan adanya kerusakan dan tidak termanfaatkannya sarana dan prasarana yang sudah ada dikarenakan tidak adanya acuan untuk saling berkoordinasi diantara instansi-instansi tersebut. Selain itu, pihak UPTD BBI Lubuk Minturun yang berada dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dilibatkan karena pengelolaan kawasan tersebut diserahkan kepada UPTD BBI sebagai pihak yang mengelola kawasan agrowisata.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 430-78-2015, maka muncul Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan bahwa fungsi UPTD BBI Lubuk Minturun dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan agrowisata yang tertuang dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman pangan¹⁰.

Oleh karena Peraturan Gubernur tersebut, maka selaku Dinas yang bertanggung jawab atas UPTD BBI Lubuk Minturun dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera barat Nomor : 521.1/6784 Diperta-2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura (UPTD BBI TPPH) Provinsi Sumatera Barat, demi kelancaran tugas tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam uraian tugas tersebut bertambahnya tugas pokok dan fungsi UPTD BBI TPPH sebagai berikut :¹¹ mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang benih induk tanaman padi palawija, hortikultura dan agrowisata, untuk melaksanakan tugas UPTD BBI TPPH menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana pengembangan teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pengkajian dan analisis teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pengujian dan persiapan teknologi benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan kebijakan teknis operasional benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan operasional

¹⁰ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Sumatera Barat pasal 17

¹¹ Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.1/6784 Diperta-2015 tentang Uraian Tugas dan fungsi UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat

tugas teknis DPTP sesuai dengan bidang benih induk tanaman padi palawija dan hortikultura; pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan agrowisata; dan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini, maka segala bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kawasan agrowisata berdasar uraian tugas pokok dan fungsi diserahkan kepada UPTD BBI TPPH dibawah naungan Dinas Pertanian Tanaman pangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan agrowisata tersebut sudah difasilitasi oleh dinas pertanian tanaman pangan provinsi dan dipertanggung jawabkan kepada SKPD atau instansi yang tergabung di dalamnya. Adapun posisi dan peran satgas dalam penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Anggota dan Peran Satgas

No	Anggota Satuan Tugas	SKPD	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	Ir. Djoni	Kadis. DPTP Tahun 2015 Prov. Sumbar	Ketua pengarah yang mengarahkan anggota satgas dalam setiap pembangunan infrastruktur kawasan agro.
2	Ir. Andi Ikhvan, ME	Kabid. Irigasi dan Rawa PSDA Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam pengadaan saluran irigasi dan pengairan dala kawasan agrowisata.
3	Drs. Didit P. Santoso	Kabid. Pemasaran Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas seperti pengadaan spanduk dan kegiatan promosi serta memberi edukasi terhadap siswa SMK PP N Padang.
4	Ir. Effendi, M.P	Kadis. Badan Ketahanan Pangan	Bertanggung jawab dalam memfasilitasi sarana dan prasarana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
5	Dudi Badrudin, S.Hut	Kasi. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam pengadaan jamur tiram, arboretum, dan lebah madu.
6	Wardarusmen, SE, MM	Ka. Biro Perekonomian Gubernur Sumbar	Tim Pengarah dari Kantor Gubernur yang melihat jalannya proses pembangunan.
7	Ir. Gusti Rufita, MP	Kasubid. Ekonomi Bappeda Prov. Sumbar	Tim Pengarah dari Kantor Bappeda Provinsi sebagai wadah aspirasi dari satgas kawasan agro.
8	Ir. Iriana Dewi Yeni	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Prov. Sumbar	Anggota dari leading sektor yaitu Dinas Pertanian Tanaman pangan.

9	Fitra Yeni, SP	Kasi Holtikultura DPTP	Penanggung Jawab Sektor Pertanian
10	Asistassia, S.S	Kasi. Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan promosi kawasan agro.
11	Guswardi, S.PT, M.Si	Kabid. Perikanan Tangkap DKP	Bertanggung jawab dalam pengadaan kolam ikan, bibit dan Pembudidayaan Ikan
12	Nanang Muldansyah, SP, M.Si	Kasi. Produksi dan Usaha Pembudidayaan DKP Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam bagaimana pembudidayaan bibit ikan.
13	Ir. Harmen	Kabid. Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan Prov. Sumbar	Bertanggung jawab dalam pengadaan sapi perah dan kandang serta pakan ternak.
14	Ir. Nur Fitriisman, MM	Kabid. Kominfo Dishubkominfo Prov. Sumbar	Sektor Komunikasi dan Informasi TI bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas Wifi dalam kawasan agrowisata.
15	Ir. Fatriaman Nur	Kabid. Perumahan Dinas Prasjaltarkim Prov. Sumbar	Sektor Jalan Lingkungan dan Infrastruktur Pembangunan yang bertanggung jawab dalam pengadaan jalan disepanjang kawasan agro.

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat Koordinasi yang dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi tersebut, sebagaimana peran posisi masing-masing satgas yang peneliti temukan dilapangan. Yang mana posisi dari masing-masing satgas tersebut dalam hanya sebagai penanggung jawab dalam pembangunannya, Koordinasi antar Satgas terutama dari pihak Kadis. DPTP sebagai pencetus ide kegiatan mengajak seluruh dinas-dinas yang tergabung kedalam anggota satgas untuk membantu penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Sesuai permasalahan yang peneliti temukan dilapangan dari seluruh SKPD yang tergabung pada pembentukan Satgas, tidak seluruhnya terjun langsung ke lapangan.

Dalam hal ini merujuk pada judul yang peneliti angkat dengan tema kawasan agrowisata khususnya, penulis mengambil kawasan agrowisata berbasis tanaman hias yang dibudidayakan di daerah Lubuk Minturun kota Padang. Kawasan agrowisata ini sudah dimulai dari tahun 2013 hingga saat ini telah

berhasil dibangun berbagai infrastruktur didalamnya dengan anggaran yang datang dari APBD maupun APBN. Sejak tahun 2013 telah dilakukan perencanaan terhadap beberapa infrastruktur kawasan agrowisata BBI Lubuk minturun dan dimulai pada tahun 2014 diawali oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang telah membangun beberapa fasilitas yaitu membangun Kantor Baru BBI, membangun Mess, membangun tempat pembibitan, kolam ikan dan infrastruktur lainnya. Berikut contoh sarana prasarana infrastruktur yang sudah dibangun pada kawasan agrowisata yang terlihat pada gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Kolam Ikan Hias di Balai Benih Induk Lubuk Minturun Kota Padang



Sumber: Dokumentasi UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat 2014

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat pembangunan Infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat yang telah dibangun pada tahun 2014, hal ini sebagai bentuk penunjang kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.3
Mess Balai Benih Induk Lubuk Minturun Kota Padang



Sumber: dokumentasi peneliti 2018

Berdasarkan gambar 1.3 merupakan contoh infrastruktur yang telah dibangun oleh SKPD masing-masing yang merupakan bagian dari beberapa infrastruktur yang akan dibangun di kawasan agrowisata BBI TPPH. Pada tahun 2014 beberapa SKPD terkait pun mulai ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur kawasan agrowisata BBI Lubuk minturun, berikut tabel mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang dilengkapi yaitu ;

Tabel 1.2
Fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang dilengkapi tahun 2014

No.	SKPD terkait	Keterangan
1.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Beberapa fasilitas yang dibangun antara lain, menanam tanaman buah naga, lengkeng, mangga, jeruk, nangka, aneka obat, belimbing, durian, sayuran, dan lainnya
2.	Dinas Perkebunan	Menanam tanaman kopi, coklat, mengadakan perlengkapan outlet penjualan hasil perkebunan.
3.	Dinas Peternakan	Mengadakan sapi perah dan rumputnya, membangun instalasi biogas, peralatan pembuat es cream susu sapi.
4.	Dinas Perikanan	Mengadakan aquarium dan berbagai jenis ikan hias, pengadaan beberapa jenis ikan air tawar (koi, lele, mas, nila dan gurami), dan air mancur.
5.	Dinas Kehutanan	Pengadaan rumah jamur dan budidaya jamur tiram, peternakan lebah madu, dan membuat kawasan arboretum.

6.	Badan Ketahanan Pangan	Memfasilitasi sarana dan prasarana Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL) serta beberapa jenis tanaman untuk perumahan dalam lokasi kawasan agrowisata lumin.
7.	Dinas Prasjaltarkim	Membuat DED dan maket kawasan Agrowisata BBI Lubuk Minturun, membangun jalan lingkaran Agrowisata BBI, membuat kolam ikan air mancur, serta membuat lampu penerangan lokasi agrowisata BBI lubuk minturun.
8.	Dinas PSDA	Membangun dan memperbaiki saluran irigasi, membuat kolam bertingkat.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. Tahun 2018.

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat perencanaan dari Dinas yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan pembangunan infrastruktur pada kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014. Adapun dari masing-masing anggota satgas merencanakan pembangunan dan pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

Dan pada tahun 2015 beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang sudah dilengkapi adalah :

Tabel 1.3
Fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang dilengkapi tahun 2015

No.	SKPD terkait	Keterangan
1.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Dana APBD Melengkapi tanaman landscape kawasan Agrowisata, merehab kantor menjadi gazebo, membuat 2 unit gazebo, melengkapi kolam bertingkat dengan lampu hias, membuat kolam, fasilitas sarana produksi kebun sayur dan buah semusim, rehab rumah dinas, melanjutkan membangun pagar kebun agrowisata serta pemeliharaan tanaman koleksi agrowisata. Fasilitasi Dana APBN (Hortipart) Membuat vertical Garden, melengkapi landscape kawasan agrowisata, pembuatan pergola untuk agrowisata, pembuatan 2 unit screen house untuk sayuran, 1 unit untuk tanaman anggrek, 2 sprinkler untuk pengairan, outlet tanaman hias dan rehab bangunan labor kultur jaringan jadi outlet hasil olahan berbagai jenis produk tanaman pangan dan hortikultura.
2.	Dinas Perkebunan	Perawatan tanaman perkebunan agrowisata.
3.	Dinas Peternakan	Membuat pagar kebun rumput dan kandang sapi, rehab gudang menjadi outlet hasil produk peternakan.
4.	Dinas Perikanan	Pemeliharaan ikan aquarium air tawar dan membuat aquarium ikan laut.

5.	Dinas Kehutanan	Pemeliharaan kawasan arboretum, jamur tiram, dan ternak lebah madu.
6.	Badan Ketahanan Pangan	Pemeliharaan tanaman KRPL.
7.	Dinas Prasjaltarkim	Membuat lapangan parkir, gedung pusat informasi, membuat DED dan maket agrowisata BBI Alahan panjang. Total Rencana Anggaran pada DED tersebut lebih kurang 46 Milyar.
8.	Dinas PSDA	Melanjutkan saluran irigasi yang masih tertinggal.
9.	Dinas Parekraf	Membuat baliho kawasan agrowisata BBI lubuk minturun, melatih masyarakat, pelajar SMK pertanian sebagai pemandu agrowisata BBI lubuk minturun.
10.	Dinas Hubkominfo	Fasilitasi jaringan WIFI kawasan agrowisata.

Sumber : Olahan Peneliti 2018

Berdasarkan Tabel 1.3, walaupun terjadi peningkatan pembangunan kawasan agrowisata oleh beberapa instansi, nyatanya masih banyak fasilitas yang belum terealisasi sesuai DED, yaitu :¹² Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam pembangunan rumah sarana produksi; Dinas Perkebunan dalam membangun outlet untuk hasil olahan tanaman perkebunan ; Dinas Peternakan yaitu pembangunan outlet untuk hasil olahan peternakan; Dinas Perikanan untuk rehabilitasi kolam (6 kolam); Dinas Prasjaltarkim dalam pembangunan menara pandang dan restorasi, dan penyelesaian jalan lingkar. Sampai tahun anggaran 2015 ini telah dicairkan anggaran untuk berbagai kegiatan dan infrastruktur sebanyak 17,2 Milyar yang bersumber dari dana APBD sekitar 16 M dan APBN1,2 M. Khusus tahun 2016 dinas pertanian tetap mengalokasikan dana untuk kesempurnaan fasilitas dan infrastruktur lokasi agrowisata BBI lubuk minturun diantaranya : membuat gudang alsintan, melengkapi pagar pengaman tanaman, membuat sumur bor dalam dan menara air, melengkapi tanaman kawasan agrowisata, membuat toilet umum, membangun outlet P2HP melalui

¹² Notulensi rapat hasil pertemuan agrowisata BBI dengan beberapa SKPD tanggal 24 Oktober 2016

kegiatan hortipark, akan tetapi masih ada beberapa fasilitas yang masih belum selesai dan pembangunan tidak dilanjutkan. Berikut dapat dilihat pada Tabel 1.4 yang sudah direncanakan pada kawasan agrowisata lubuk minturun :

Tabel 1.4
Rencana Dukungan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Agrowisata

No	SKPD	Kegiatan	Tahun		Keterangan		
			2014	2015	Rencana	Sedang Dikerjakan	Tersedia
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Gudang Alsintan Ruang Administrasi 20x10 Semi Permanen Dinding Beton H= 1,5 + Kawat (1) unit	✓				✓
		Gudang Pupuk 10 x 6 Semi Permanen Dinding Beton H= 1,5 + Kawat (1) Unit	✓				✓
2	Badan Ketahanan Pangan	Outlet untuk penjualan/ penampungan produksi sayur	✓				✓
		Jalan setapak/ pedestrian di lokasi KRPL (kawasan Rumah Pangan Lestari)	✓				✓
		Instalasi Air Bersih untuk Perawatan Bangunan	✓				✓
3	Dinas Perkebunan	Outlet/ cafe untuk Produksi Hasil Perkebunan Permanen 6x6 (1) unit	✓		✓		
4	Dinas Kelautan	Rehabilitasi Kolam	✓				✓

	dan Perikanan	bertingkat 1 set kolam permanen dengan dasar kolam beton 2x2 (6 unit) sekat saluran 25 cm					
		Rehabilitasi kolam aquaphonik permanen, dasar kolam tanah, 5x8x1,5 (2 unit)	✓		✓		
		Rehabilitasi kolam therapy H= 80cm kolam permanen + keramik + tempat duduk H= 20 cm kanopi keliling	✓		✓		
		Rehabilitasi kolam hias permanen (1 unit)	✓				✓
		Rehabilitasi kolam pancing permanen dasar tanah 12x15x1,5 + fasilitas (tempat duduk dan kanopi) 2 unit	✓		✓		
		Rehabilitasi kolam pacu belut/ lumpur kolam permanen dasar beton 10x10x0,8 (1unit)	✓		✓		
		Rehabilitasi kolam pembenihan permanen dasar beton + fasilitas 4x3 (4 unit)	✓				✓
		Kios/ warung penjualan pelet 3x4 (1 unit)	✓		✓		

		Kolam air bersih (mandi anak/anak) kolam alami, dinding dan dasar kolam susunan batu kali 12x 15 (1 unit)	✓		✓		
5	Dinas Peternakan	Kafe hasil olahan Peternakan 6,5x5	✓				✓
		Gazebo 4x4 (1 unit)	✓				✓
		Gudang Pakan Ternak 6,5x 3	✓				✓
		Ruang Pengolahan Pupuk 6,5x3	✓				✓
		Kios/ toko penjualan pupuk 6,5x3	✓				✓
		Jaringan air bersih	✓				✓
6.	Dinas Kehutanan	Jalan lingkaran sepeda motor (dalam lokasi arboretum)	✓				✓
		Jalan setapak/ pedestrian (dalam lokasi arboretum)	✓				✓
		Instalasi air untuk keran taman	✓				✓
		Kios/ warung penjualan jamur, madu dll 4x4 (1 unit)	✓				✓
		Bak penampungan air kapasitas 10 M kubik	✓		✓		
7	Dinas Prasjal Tarkim	Menara pantau bangunan dasar 12x12, menara 6x6x16 (1 unit)	✓		✓		
		Lampu penerangan jalan	✓				✓
		Lampu hias kawasan	✓				✓
		Restoran	✓				✓

		20x20 (1 unit)					
		Perencanaan jalan	✓				✓
		Parkir kapasitas 200 kendaraan roda 4 + 150 roda 2	✓				✓
		Tugu dan pelataran + instalasi lampu taman + tempat duduk	✓		✓		
8	Dinas PSDA	Perencanaan irigasi dalam kawasan	✓		✓		
9	Dinas Parekraf	Membuat baliho kawasan Agrowisata		✓			✓
10	Dinas Hubkominfo	Fasilitas jaringan WIFI		✓			✓

Sumber : Dokumentasi Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.4 Masih banyaknya sarana prasarana yang diperlukan demi terwujudnya kawasan agrowisata BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun, fasilitas yang belum memadai pada objek agrowisata padahal kawasan ini banyak didatangi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, anak sekolah dari dalam daerah maupun luar daerah hanya sekedar melihat-lihat ataupun belajar pertanian, selain itu ada juga mahasiswa magang yang belajar di BBI TPPH ini. Berikut tabel data pengunjung sepanjang tahun 2015 berdasarkan rata-rata kujungan rombongan :

Tabel 1.5
Data pengunjung sepanjang tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (rombongan)
1.	Januari	13
2.	Februari	15
3.	Maret	11
4.	April	9
5.	Mei	5
6.	Juni	1
7.	Juli	5

8.	Agustus	2
9.	September	3
10.	Oktober	15
11.	November	14
12.	Desember	3

Sumber: UPTD BBI TPPH Sumatera Barat 2015

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat kita lihat bahwa para pengunjung yang datang setiap bulannya mengalami naik turun karena kawasan agrowisata ini masih kurang dalam segi infrastruktur sehingga mengurangi minat dan keinginan wisatawan dalam berwisata. Kunjungan ini lebih banyak datang dari anak sekolah, mahasiswa dan kunjungan kerja dari tiap-tiap instansi baik itu di dalam maupun luar Sumatera Barat.

Berkurangnya minat wisatawan untuk datang ke kawasan agrowisata Lubuk Minturun karena kurangnya promosi dan terbengkalainya infrastruktur baik itu dari segi pengadaan obyek-obyek pertaniannya maupun segi fasilitas yang terdiri dari berbagai sarana dan prasarana. Berikut contoh gambar sarana yang terbengkalai di kawasan agrowisata :

Gambar 1.4
Kolam Aquaponik



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2018

Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengelolaan fasilitas dalam memanfaatkan infrastruktur yang ada pada kawasan agrowisata padahal sudah dibangun. Karena masalah-masalah tersebut, maka dilakukan pertemuan oleh beberapa SKPD di Lubuk Minturun pada tanggal 24 Oktober 2016 dimana dalam beberapa kesimpulan rapat tersebut merujuk kepada kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sarana prasarana baik itu dengan lingkungan dalam dan luar areal agrowisata. Sejatinya, hasil pertemuan ini membahas tentang revisi keputusan gubernur sumatera barat NOMOR 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015 terkait ; susunan keanggotaan yang harus direvisi, banyaknya sarana dan prasarana yang belum dibangun sampai saat ini dan adapun bangunan yang rusak sehingga diminta perbaikan, belum tertatanya infrastruktur yang menjadi penunjang kemajuan bagi agrowisata lubuk minturun sehingga diharapkan pada SKPD yang terkait untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan pada masing-masing SKPD, belum adanya penyerahan aset tersebut kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Berdasarkan informasi tersebut, bisa dilihat bahwa koordinasi yang terjadi antar instansi tersebut mengalami kendala.

Seperti yang diungkapkan juga oleh kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, bahwa :

“...Sejak dilakukan mutasi pada akhir desember 2016 lalu, pembangunan kawasan agrowisata ini menjadi terhambat terlebih susunan keanggotaan satuan tugas yang diamanatkan kepada perorangan dalam SKPD bukannya dilimpahkan kepada OPD terkait, ini juga disebabkan karena belum adanya revisi terhadap susunan keanggotaan tersebut sehingga

pelaksanaan pembangunan tidak lagi berjalan...” (wawancara dengan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk Lubuk Minturun Kota Padang Hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 pukul 13.45-14.33 WIB)

Dari kutipan wawancara diatas benar dikatakan bahwa sudah bertukarnya keanggotaan yang menjadi satuan tugas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola agrowisata menyebabkan kurang efisiennya pembangunan di sekitar lingkungan agrowisata. Adanya beberapa instansi yang belum aktif dan mangkir dari tanggung jawab terkait pelaksanaan pembangunan kawasan agrowisata ini. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif masing-masing satuan tugas pada SKPD.

Koordinasi sesungguhnya hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, apalagi ini menyangkut banyak instansi dan kepentingan demi terwujudnya kawasan agrowisata yang representatif. Berdasarkan fenomena yang penulis lihat di lapangan, kurangnya koordinasi menjadi salah satu penghalang bagi UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun dalam mengelola kawasan agrowisata karena tidak hanya menjadi tanggung jawab tunggal UPTD BBI saja tetapi juga merupakan tanggung jawab dinas, instansi atau lembaga terkait. Alasan utama untuk melakukan koordinasi disini adalah dinas/ lembaga dan kelompok kerja saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan kawasan agrowisata yang mumpuni dan layak dijadikan kawasan wisata. Untuk itu, maka peneliti lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam upaya menjadikan UPTD BBI Lubuk Minturun sebagai destinasi agrowisata.

Menurut Hasibuan seperti yang dikutip oleh Sandy Risdyandy¹³ koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja. Kesatuan tindakan merupakan suatu kesatuan pengaturan jadwal dan waktu agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari hasil wawancara dengan Fitra Yeni, menjelaskan bahwa:

“... sejauh ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai leading sektoral hanya melaksanakan kegiatan jika itu diminta oleh UPTD BBI Lubuk Minturun, ketika mereka menginginkan penyuluhan, ya kami fasilitasi. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini kami tidak punya event khusus...” (wawancara dengan staf bagian Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumbar pada hari Senin, 12 November 2017 pukul 10.00-10.45 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, peranan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan masih belum terlihat. Hal ini mengakibatkan tidak sepenuhnya koordinasi antar lintas sektoral ini berjalan melihat tidak adanya kerjasama sehingga koordinasi tersebut tidak efektif. Dalam berkoordinasi sesungguhnya diperlukan peranan pemimpin dan kesatuan tindakan masing-masing unit organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.¹⁴

Selain itu, komunikasi antar anggota SKPD yang terlibat juga mempengaruhi koordinasi, dimana komunikasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari koordinasi. Dalam suatu organisasi komunikasi sangatlah penting

¹³ Sandy Risdyandy. Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda, e-jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2014.

¹⁴ *Ibid.* hlm 13

karena dengan begitu partisipasi antar anggota lintas sektor akan semakin tinggi. Dari pimpinan sebagai leading sektor untuk memberikan tugas kepada rekan kerja melalui komunikasi. Dengan demikian, komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari hasil wawancara dengan Ibuk Ir. Rini Hostorina, MP yang mengatakan bahwa :

“... Selama ini komunikasi antar anggota SKPD yang terlibat hanya berjalan diawal-awal perencanaan dan kegiatan saja. Waktu itu masih hangat-hangatnya menginginkan dibentuknya kawasan agrowisata ini, komunikasi pun dilakukan bahkan mengadakan diskusi. Kami dari pihak UPTD hanya memberikan fasilitas tempat mereka yang membuat. Ketika mereka akan melaksanakan pembangunan, ya kita menerima dengan sebaik-baiknya...” (wawancara dengan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI Lubuk Minturun pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 pukul 13.35-14.33 WIB)

Dari hasil wawancara itu, dapat kita lihat bahwa komunikasi hanya berjalan di awal kegiatan akan dilaksanakan, hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi yang aktif antara SKPD yang terkait dalam pembangunan kawasan, sehingga terkesan bekerja sendiri-sendiri dan lepas tangan terhadap perencanaan di awal pertemuan yang mengakibatkan koordinasi tidak berjalan dengan baik. Komunikasi sebenarnya adalah alat bagi sebuah organisasi untuk menghubungkan masing-masing unit yang terpisah. Jadi, komunikasi juga termasuk yang menghubungkan jalannya koordinasi dalam sebuah organisasi.

Faktor lain yang mempengaruhi koordinasi adalah pembagian kerja. Pembagian kerja ini diharapkan agar dapat berfungsi dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas untuk melaksanakan

sekumpulan kegiatan yang terbatas.¹⁵ Dalam struktur pembagian kerja dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata ini melibatkan beberapa instansi dan SKPD serta 1 (satu) UPTD. Dimana pembagian kerja masing-masing instansi dalam pembangunan infrastruktur agrowisata ini disesuaikan berdasarkan masing-masing tupoksi mereka. Hasil wawancara dengan Ir. Rini Historina, MP mengenai pembagian kerja sebagai berikut :

“... kalau untuk pembagian kerja, kami dari UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun sudah dijelaskan melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2015 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan melalui Uraian Tupoksi. Kalau SKPD lain pembagian kerjanya juga sudah pernah diatur dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 430-78-2015 berdasarkan tupoksi masing- masing dan ini merupakan SK yang terakhir sebelum terjadi mutasi anggota satuan tugasnya...” (wawancara dengan Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan UPTD BBI Lubuk Minturun pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 pukul 13.35-14.33 WIB)

Pembagian kerja ini merupakan perincian tugas dari masing-masing kegiatan unit yang terpisah. Dari kutipan diatas, dapat kita lihat bahwa masing-masing SKPD memiliki tupoksi sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun, maka setiap instansi terkait menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi masing-masing agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya program pembangunan pertanian kedepan harus lebih banyak berorientasi pada peningkatan pendapatan. Baik melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas yang

¹⁵ *Ibid.hlm 14*

dikembangkan serta peningkatan posisi tawar petani. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam upaya pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di Balai Benih Induk TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan koordinasi antar SKPD terkait yang belum berjalan secara maksimal.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwasanya Satgas yang tergabung dalam penyiapan pembangunan infrastruktur di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, yang mana peneliti menemukan indikator-indikator permasalahan yang menyebabkan kurang berjalannya koordinasi antar Satgas. Karena pada dasarnya Koordinasi yang dilakukan melibatkan banyak instansi dalam proses pembangunannya, hal ini terlihat dalam pembangunannya berjalan cukup lama padahal perencanaan sudah ada. Yang mana dalam permasalahan yang peneliti temukan di lapangan tersebut dikarenakan kurang terjalinnya komunikasi antar satgas sehingga satgas sulit untuk membagi waktu. Dalam hal ini permasalahan lain yang peneliti temukan di lapangan, Kurang terjalinnya koordinasi yang dilakukan hal ini disebabkan oleh SK Satgas hanya sampai tahun 2015 dan tidak diteruskan pada tahun berikutnya sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur di kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

Dari permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui koordinasi antar satgas yang tergabung dalam penyiapan pembangunan infrastruktur dalam kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi koordinasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang koordinasi dalam pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun dengan judul “ **Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD Balai Benih Induk (BBI) TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai batasan penelitian yaitu bagaimana Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD Balai Benih Induk (BBI) TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD Balai Benih Induk (BBI) TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Satuan Tugas (Satgas) dalam penyiapan pembangunan infrastruktur dalam kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang, dalam berkoordinasi untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur

kawasan agrowisata dan UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik terutama dalam Koordinasi Dalam Pembangunan Infrastruktur, serta sebagai rujukan dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

